

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya pembangunan ekonomi di Indonesia ditandai dengan banyaknya peluang-peluang usaha baru yang tercipta dan juga terus masuknya arus investasi dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari banyak munculnya para pelaku usaha baru baik dengan skala besar maupun pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dalam hal ini dapat dilihat secara tidak langsung hadirnya investor telah menghapuskan hambatan-hambatan yang dahulu menghadang penanam modal, baik hambatan tarif (*tariff barrier*) maupun hambatan non tarif (*non tariff barriers*) juga telah meniadakan sekat-sekat batas hubungan ekonomi internasional negara menjadi tanpa batas (*borderless*).

Masuknya arus investasi di Indonesia telah menjaring seluruh bidang penanaman modal, karena investasi menjadi salah satu penggerak proses penguatan perekonomian suatu negara. Dari sini yang kemudian negara dituntut untuk dapat meningkatkan investasinya sebagai suatu implementasi dari kebijakan ekonomi. Investasi tidak hanya menjadi kebutuhan penting pendorong pembangunan ekonomi suatu negara, tetapi juga merupakan sarana utama dalam pengembangan pembangunan suatu industri.¹

Salah satu industri yang memiliki persaingan serta permintaan pasar yang sangat tinggi di Indonesia adalah industri semen. Semen merupakan salah satu material penunjang dengan pengelolaan sumber daya alam bahan galian non logam berupa batu kapur, tanah liat, pasir besi, dan pasir silika dan gipsum (diimpor) melalui proses pembakaran pada temperatur tinggi. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dengan mengatakan semen merupakan industri manufaktur yang termasuk industri material

¹ Meauthia Rosfhadila, *Mengukur Dampak Keberadaan Supermarket Terhadap Pasar Tradisional, dalam Lembaga Penelitian SEMERU*, April-Juni 2007, hlm 11-12

dasar.² Untuk itu dalam pemenuhan bahan baku semen dilakukan dari satu daerah ke daerah lain agar dapat menunjang pasokan bahan baku industri dalam skala besar. Potensi sumber daya alam di Indonesia khususnya dalam bidang industri telah menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya, sebab di Indonesia sendiri penyebaran industri belum sepenuhnya merata khususnya pada daerah yang terjaring dalam Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Kehadiran perusahaan industri di daerah diyakini dapat mempengaruhi harga kebutuhan industri di pasaran, sebab penyebaran perusahaan industri tidak harus berpusat pada kota-kota besar saja melainkan pelosok sekalipun diharapkan dapat menjangkaunya.

Seiring dengan berkembangnya infrastruktur di Indonesia menjadikan semen sebagai bahan baku yang bernilai ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan akan bahan baku. Kegiatan industri ini dirasa cukup menjanjikan bagi pemenuhan pasokan semen lokal, namun juga ada yang lebih dari itu yaitu dapat meningkatkan kegiatan ekspor pada negara-negara yang minim akan kebutuhan semen. Hal inilah yang akhirnya menjadikan para investor tertarik dalam mengeksploitasi semen di berbagai wilayah di Indonesia. Adanya beberapa daerah yang berpotensi dalam pemenuhan bahan baku semen membuat jaringan industri yang ada juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam hal ini kegiatan industri menjadi batasan bagi siapa saja yang ingin mengelolah sumber daya alam tersebut harus melewati kebijakan dari masing-masing daerah. Kemudian adanya penyelegaraan ini dapat dilakukan dengan melalui asas desentralisasi, yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam menjaga keseimbangan pengelolaan sumber daya alam pada masing-masing daerah. Salah satu aspek mendasar dalam otonomi daerah adalah sejauh mana pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan demikian adanya kesempatan ini diharapkan dapat membentuk inisiatif maupun kreatifitas dalam memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki secara maksimal. Namun demikian bukan berarti pemerintah daerah boleh bertindak semauanya sendiri, tanpa memperhitungkan dampak dari kebijakannya terhadap keselamatan dan keseimbangan.³

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional

Tidak jarang dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesiaseringkali dikaitkan dengan eksistensi elit dan penguasa lokal, kepentingan kekuasaan, pelayanan publik, kelembagaan, korupsi, dan fiskal. Sehingga dapat diartikan bahwa praktek desentralisasi tidak hanya menciptakan keberhasilan saja melainkan juga dapat menjadi arena yang nyaman bagi elit politik, sebab mereka dapat merestorasi kekuasaan yang dimiliki untuk meneguhkan kekuasaan mereka atas sumber daya sosial maupun ekonomi. Desentralisasi telah menyediakan arena mereka atas keuntungan mereka , (Nordholt & Klinken, 2007) dalam studinya mengenai praktek desentralisasi di Bangka menyatakan bahwa seringkali aktor negaratingkat lokal terlibat dalam mafia bisnis. Adanya perspektif mengenai kewenangan birokrat dalam mengakses kekuasaan dengan memberikan izin, memberikan proteksi, menciptakan ,dan mengesahkan peraturan menjadikan arena ini seringkali dianggap sebagai kepentingan bagi suatu kelompok semata. Keterbatasan dana tidak dapat membiayai kehidupan dan kepentingan ideologinya menjadi salah satu pemicunya, sedangkan pada pihak pebisnis adalah mereka yang memiliki modal namun tidak memiliki akses kekuasaan. Sehingga dalam kondisi ini hubungan antara para pebisnis, politikus, birokrat akan selalu dipertahankan. Akibat dari itu banyak proyek atau program pembangunan menjadi salah urus dan hal tersebut kemudian dapat merugikan negara serta masyarakat.

Dari adanya gambaran di atas, dalam rangka pembangunan seringkali pemerintah lokal berada dalam kondisi dinamika, adanya dinamika ini kemudian dapat memicu sebuah konflik. Konflik yang terjadi terbentuk dari adanya

³ Bambang Sutrisno, Langkah Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup: Sebuah Kajian Teoritis Yuridis Normatif, FH Uniska Press, Kediri, 2009, hlm 13-14

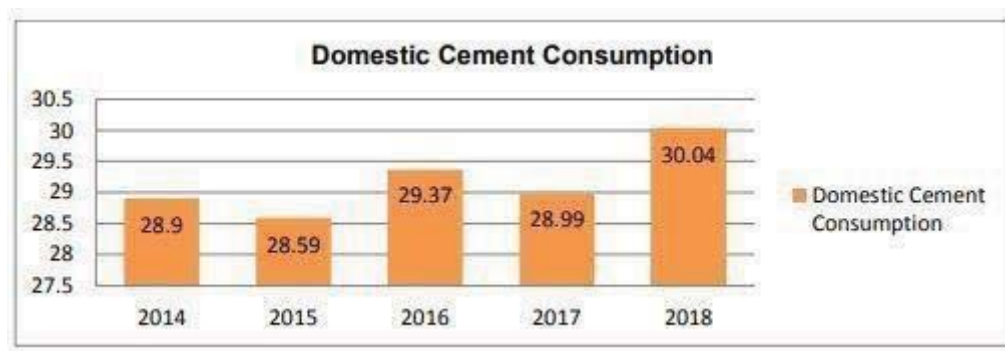
pertentangan atas serangkaian upaya atau kegiatan dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat yang teratur dan terorganisir dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat mengikat bagi semua warga negara.⁴ Hal ini menjadi penting, sebab implementasi dari desentralisasi dapat diterapkan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga pada *output* desentralisasi dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: pertumbuhan ekonomi pada masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan fleksibilitas program pembangunan. Analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bidang-bidang yang dapat dijadikan indikator dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti: perkembangan sektor industri, perkembangan sektor pertambangan, perkembangan sektor pertanian, perkembangan sektor pariwisata, dan lain sebagainya.

Adanya kemitraan diantara sektor publik saat ini menjadi standart konsep dalam lingkungan pemerintahan lokal. Pemerintahan sebagai pemegang kendali atas segala program-program yang dibuat harus bisa mendapatkan jawaban atas masalah-masalah pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah lokal itu sendiri. Pemahaman mengenai praktik tata ruang khususnya dalam pembangunan industri dapat dilihat dengan cara bagaimana ruang-ruang yang ada dikonstruksi dan diperebutkan oleh tiap-tiap aktor berdasarkan kepentingan yang diwujudkan dalam pendirian bangunan. Proses konstruksi ruang berkaitan erat dengan relasi kuasa dalam pemerintahan. Ruang dalam hal ini merupakan area dan alat yang berfungsi melestarikan tatanan ekonomi-politik dengan memiliki karakteristik interaktif dari investor/kapitalis (pengusaha), negara (pemerintah), dan masyarakat (termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian dibidang ekologi). Oleh sebab itu kontestasi antar aktor tidak bisa dihindarkan.

⁴ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, (Cetakan Dua, Djambatan, Bandung, 2004), hlm 88-89

Hal ini sejalan dengan gagasan Lefebvre (1974,1991) yang menyatakan bahwa ruang merupakan produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan pasif.⁵ Maraknya pembangunan industri di Indonesia, mengharuskan pemerintah dapat memastikan jika pembangunan kawasan industri adalah pembangunan yang bersifat berkelanjutan, dimaknai dengan pembangunan sebagai upaya kebijakan dalam memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhanmerekanantinya. Hal ini berkaitan langsung dengan adanya pelaksanaan pembangunan atas isu-isu serta tantangan yang kian kompleks, sebab dalam permasalahan yang berhubungan dengan sosial akan mempengaruhi banyak sektor yang saling terkait.

Tabel 1.1 Konsumsi Semen di Indonesia (Tahun 2014-2018)



Sumber: PT Semen Indonesia Tbk, Annual Repost 2014-2018

Melihat tingginya konsumsi semen dan perkembangan industri semen yang sangat pesat, produsen semen yang ada harus semakin berkembang dengan tambahan kapasitas terpasang. Perusahaan lokal maupun internasional juga sudah menunjukkan eksistensinya di Indonesia, kondisi ini yang kemudian menjadikan adanya persaingan bisnis. Masuknya perusahaan semen dari luar negeri saat ini menjadi pemain baru yang kiprahnya sangat dikhawatirkan pemain lokal, beberapa diantaranya dari China, yaitu : Conch Cement, Jui Sin, Haohan Cement. Perusahaan

⁵ Siti Aminah, Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya, Masyarakat : Jurnal Sosiologi 20, no.1 (Januari 2015), hlm 61.

tersebut akan menambah persaingan sengit dari perusahaan yang lebih dulu ada. Masuknya investor baru yang akan mulai membangun pabrik dan perkembangan perusahaan semen lokal secara bersamaan salah satunya dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang besar dan simultan di berbagai di Indonesia.

Namun dalam praktiknya tidak sedikit perusahaan industri di Indonesia mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, hal ini disebabkan adanya isu-isu lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Pada kondisi yang ada perusahaan-perusahaan industri seringkali mendominasi penguasaan atas sumber daya yang tersedia. Melihat kondisi tersebut menjadikan peran penting Pemerintah Daerah dalam menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan rencana pembangunan daerah. Begitu juga sebaliknya, selama masih ada perbedaan diantara pihak yang berkepentingan konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi.

Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial, yang bernama negara, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan, konflik terjadi dimasa lalu dan pasti akan terjadi yang akan datang.⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie dalam sistem negara modern yang menjadi supremasi hukum dan konstitusi, pasar, dan masyarakat harus ada dalam kedudukan yang seimbang, dan berada dalam hubungan yang sinergis serta secara fungsional yang saling menunjang.⁷

Naun dalam merealisasikan suatu pembangunan industri bukan hal yang mudah sebab dalam penerbitan suatu perizinan harus dilakukan secara khusus oleh *stakeholder* terkait, dalam hal ini pemerintah dan instansi-instansi terkait harus mengkaji kondisi perusahaan di lapangan secara cermat dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Yang kemudian hasil kajian tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas perizinan yang dikeluarkan.

⁶ Wirawan. (2009). Konflik dan Manajemen Konflik. Jakarta: Selemba Humanika, hlm 67

⁷ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: PSHTN FH-UI, 2004), hlm 92

UNDP dalam workshopnya menyimpan bahwa “*that good governance system are participatory, implying that all members of governance institution have a in influencing decision-making*”. Sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan bahwa semua anggota institusi *governance* memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi. Prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan (*transparent*) agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Siapa saja yang dipilih untuk membuat keputusan dalam pemerintahan, organisasi bisnis dan organisasi masyarakat sipil (*business and civil society organizations*) harus bertanggung jawab kepada publik, serta kepada institusi *stakeholders*.⁸ Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan rakyat, memfasilitasi (*fasilitative*) dan memberi peluang (*enabling*) ketimbang mengontrol (*controlling*), melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan (*the rule of law*).⁹ Dalam hal ini pemerintah dan instansi- instansi terkait memiliki tanggung jawab dalam menentukan suatu perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi prosedur serta syarat izin bangunan atau tidak.

Begitu juga dalam upaya penegakkan aturan, dalam hal ini pemerintah dapat melakukan tindakan apabila menemui perusahaan yang tidak taat pada peraturan yang ada. Aturan-aturan ini terkait sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat bukan berpihak pada kepentingan pemodal, yang berarti dalam mencapai tujuan ini dibutuhkan aparatur negara dengan desain kelambagaan yang dapat menjamin terciptanya mekanisme yang mampu meminimalisasi bahkan meniadakan konflik horizontal atau ideologis dengan mengutamakan konsensus serta ketertiban. Menurut Phillipus M.Hadjon, tujuan dari adanya perizinan pada pokoknya adalah :

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH-UIN Press, 2005), hlm 43

⁹ Ibid, hlm 24

- a. Mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, seperti izin prinsip, IMB, izin pertambangan, izin perusahaan hutan, izin berburu, dsb
- b. Mencegah bahaya atau gangguan yang ditimbulkan, misalnya : gangguan/*herder ordonantie*, AMDAL, dsb
- c. Melindungi objek tertentu, seperti: cagar budaya, izin masuk objek, dsb
- d. Distribusi benda atau barang lelang, misalnya: izin trayek, izin perdagangan satwa langka, dsb
- e. Seleksi orang atau aktivis tertentu, misalnya: SIM, izin senjata api, izin penelitian, dsb¹⁰

Maraknya perusahaan di Indonesia yang tidak memiliki izin bangunan, dapat terjadi ditengarai oleh pelanggaran-pelanggaran aturan yang ada. Sebab perizinan merupakan bentuk pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha. Izin merupakan instrumen utama dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹¹ Namun di sisi lain proses perizinan dapat terhambat bukan dari pihak perusahaan yang tidak memenuhi prosedur saja, namun di beberapa kasus perusahaan mengeluhkan adanya sejumlah ketentuan birokrat yang rumit juga menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih dalam pengembangan industri yang mana perizinan diharapkan dapat menjadi penunjang agar dunia industri dapat bersaing dengan segala macam tantangannya. Dan begitu pula bagi perusahaan industri, mereka tidak bisa berjalan apabila tidak mendapat izin dari pihak pemerintah.

Menurut Thomas Hobbes sebagaimana dikutip oleh Ramlan Surbakti di dalam bukunya yang berjudul “*Memahami Ilmu Politik*” menyatakan bahwa pada dasarnya

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, “ Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perijinan yang Rawan Gugatan”, Makalah Temu Ilmiah, HUT PERATUN XIII, Medan, 2004, hlm 34

¹¹ Philips M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Yuridika, Surabaya: 1993), hlm 21

manusia itu egois dan memiliki sifat rasional. Sehingga, sifat rasional itu yang memungkinkan manusia saling memiliki perbedaan pendapat dalam berekspresi, sifat ini lah yang menyebabkan manusia mampu membedakan antara kepentingan dirinya secara pribadi dengan kepentingan bersama. Maka dari itu sifat rasional yang dimiliki manusia lebih cenderung mengarah ke timbulnya konflik daripada keharmonisan.¹² Maka dari paparan ini kekuasaan dan kepentingan menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam menjalankan peran terhadap pengelolaan pertambangan.

Dalam memahami persoalan dan isu-isu politik lokal bentuk implementasi desentralisasi bukan semata-mata karena desain netral untuk dapat mewujudkan demokrasi ketingkat lokal, melainkan juga harus dipahami sebagai arena pergulatan kepentingan dari banyak aktor untuk memainkan kuasanya dalam area politik. Dapat dilihat dari negara yang sering kali dalam menjalankan peranan normatif tampak berlebihan seakan-akan sudah merupakan keharusan dan kewajiban dalam kerangka menjaga tatanan kekuasaan dan perilaku warga negaranya dengan mengimplementasikan gagasan-gagasan pembangunan, keadilan, demokrasi, persatuan, dan lain sebagainya. Contoh: adanya konsep tata ruang suatu kota yang disusun masih banyak mempertimbangkan kepentingan kekuatan pemodal daripada memperhatikan keberlangsungan ekologi dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini tentu menimbulkan dampak pada terbentuknya struktur politik di tingkat lokal yang bersifat menekan (represif) yang ditopang sepenuhnya oleh birokrasi. Maraknya kasus seperti diatas bahkan telah dianggap sebagai hal yang wajar dalam rangka pembangunan yang nyatanya masih dijadikan sebagai alibi oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya dan juga hal ini menjadi alat pembenaran bagi *local state actors* untuk memanipulasi makna desentralisasi dan otonomi daerah.

Negara dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber

¹² Ramlah Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*’. (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm 32

daya alam melalui pemberian instrumen izin, lisensi, dan konsesi. Dalam hal ini kapasitas birokrasi perizinan menjadi penting sebagai proses pengambilan keputusan. Prosedur pelayanan perizinan harus dilaksanakan dengan tegas, jelas, dan rinci. Kewenangan yang diambil harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, juga dapat mengatur jangka waktu pada proses prosedural. *If these procedures are not set out clearly in the legal framework, ambiguities may allow undue discretion and potential opportunities for corruption, as well as create regulatory uncertainty.*¹³ Pada hakikatnya, pemerintahan adalah proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan di implementasikan, dalam hal ini analisis pemerintahan berfokus pada aktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan serta pelaksana keputusan pada suatu struktur yang telah diatur. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjalankan tata kelola pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan secara inklusif.

Seperti halnya konflik yang terjadi oleh PT Conch Barru Cement, sejak 2015 silam hingga kini belum memiliki kepastian hukum atas perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. Sejak awal kedatangan PT Conch masuk ke Kabupaten Barru telah menemui banyak persoalan, hal ini dikarenakan belum lengkapnya izin-izin perusahaan dalam beberapa prosedur, yang kemudian berkembang ke isu-isu rusaknya lingkungan yang dianggap dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dari aspek sosial maupun ekonomi. Namun tidak sejalan dengan kontra yang terjadi, adanya Surat Keputusan Bupati dan diikuti dengan beberapa perizinan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait merupakan ketetapan yang sah dalam mengawali proses pembangunan yang akan dilakukan PT Conch Barru Cement di Kabupaten Barru.

¹³ Varsha Venugopal "Assesing Mineral Licensing in a Decentralized Context: The case of Indonesia, Executive Summary, Natural Resources Government Institute, Oktober 2014, hlm 3

Adanya keterlibatan beberapa pihak yang terlibat dalam rencana proyek industri ini setidaknya dapat dilihat dari peran masing-masing pihak dengan kepentingannya, yaitu; perusahaan sebagai pemilik modal, pemerintah sebagai pengambil keputusan, dan masyarakat sebagai kelompok yang telah tinggal di wilayah tersebut. Dalam hal ini ketiganya diharapkan dapat menjalin hubungan mutualisme agar nantinya dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat dijadikan sebagai akses masing-masing pihak untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, Kabupaten Barru disebutkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kabupaten Barru merupakan daerah yang memiliki potensi dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan ketersediaan lahan juga harga tanah yang paling kompetitif. Sehingga keberadaan industri dalam suatu wilayah akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sebagaimana menurut (Parker dkk,1992) adanya otonomi daerah menekankan pada perlunya penguatan antara publik dan aktor privat juga aktor publik bersama dengan aktor masyarakat (CSO).¹⁴

Dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat juga pelaksana atas inisiatif lokal memiliki legitimasi informasi dominan yang kuat dalam menjalankan program-program pembangunannya. Maka dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus nyata dan bertanggung jawab, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya upaya menggali sumber-sumber pembiayaan sendiri, dengan memperhatikan langkah-langkah yang komprehensif dalam merestrukturisasi pemerintahan dan pola pembangunan. Regulasi tersebut memperjelas bahwa pengelolaan SDA harus menciptakan keselamatan, mutu hidup, juga kesejahteraan masyarakat sebagai komponen utama. Implementasi dari regulasi ini berkaitan dengan SDA yang bersifat terbatas sehingga dalam prinsip ekonomi hal

¹⁴ Parker, S.R dkk. 1992. Sosiologi Industri. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 90

ini akan diperebutkan sebagai sumber daya yang langka apabila ada padanya potensi untuk memperoleh keuntungan (Cahyono dkk 2013: 1).

Peran kemitraan yang dibawa oleh swasta sendiri juga memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Dari hal ini dapat digambarkan bahwa adanya varisi sumberdaya aktor akan terlibat dalam menciptakan solusi atau isu dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi bersama dalam tingkat perencanaan maupun pelaksanaan dari proyek yang akan dijalankan. Tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan PT Conch Cement yang memilih Kabupaten Barru sebagai salah satu daerah yang berpotensi akan tambangannya ini dapat menjadi wilayah pemasok bahan baku pada produksinya. Bagi pemerintah Kabupaten Barru hal ini tentu sangat diperhatikan, sebab adanya pembangunan tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia maupun lingkungan untuk jangka panjang.

Sebelum diterbitkannya izin, pemerintah terlebih dahulu memverifikasi progres lapangan dengan beberapa dokumen izin prinsip dan lingkungan. Dalam menanti progres perizinan yang sedang dalam peninjauan, pemerintah daerah meminta kepada perusahaan agar menghentikan segala kegiatan sementara sebagai pelaksanaan tata tertib yang berlaku. Hal ini kemudian tidak ditindaklanjuti oleh PT Conch Barru Cement untuk melaksanakan himbauan tersebut, pihaknya mengakui bahwa perusahaan hanya merampungkan pembangunan yang dari awal telah dilakukan sembari menunggu hasil verifikasi berkas-berkas yang diminta oleh pemerintah daerah keluar. Kegiatan ini menimbulkan polemik bagi warga masyarakat yang mengetahui

hal tersebut, sebab menjadi pertanda bahwa PT Conch Barru Cement dianggap menentang aturan yang ada dengan tetap menjalankan kegiatan pembangunannya.

Selama peninjauan ulang berlangsung, pemerintah daerah bersama dengan tim kepolisian telah melakukan beberapa kali teguran hingga melakukan sidak, namun hasil yang didapatkan tidak hanya masalah perizinan yang belum dikeluarkan, adapun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pihak Conch, yaitu keberadaan tenaga kerja asing yang belum diverifikasi keberadaannya pada catatan imigrasi. Hal ini tentu semakin memperkuat adanya pelanggaran pada praktek bisnis ilegal. Untuk itu

pemerintah daerah meminta kepada pihak PT Conch memberhentikan segala kegiatannya dengan menyegel pabrik hingga persyaratan-persyaratan yang ada dapat dipenuhi. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barru dalam menegakkan aturan perizinan ini tidak memberikan hasil. Hal ini berlangsung terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun.

Dari proses yang panjang inilah kemudian memunculkan asumsi serta isu-isu yang kuat atas adanya indikasi kepentingan suatu kelompok. Antara PT.Conch dengan pemerintah, menunjukkan sikap tarik menarik antara keduanya, keduanya sama-sama memiliki kekuatan dalam mempertahankan keberadaannya masing-masing juga tidak bisa untuk menjatuhkan salah satunya.

Melihat fenomena diatas, menarik untuk diteliti bahwa upaya dalam membangun daerah merupakan sebuah proses yang tidak mudah dan membutuhkan waktu serta kerjasama antar pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan. Adanya dimensi aktor dalam penyelenggaraan kebijakan ini menjadi penting dijadikan sebagai bagian dari penelitian karena sejatinya setiap aktor memiliki peran dan tujuanstrategis dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Kepentingan yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya daerah akan melibatkan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat menjadi hal yang senantiasa menarik untuk di lihat. Persinggungan politik pada keempat elemen tersebut sangat menarik dan cukup dinamis. Dan juga dalam perspektif lain juga dapat dilihat dengan keterlibatan elite-elite politik lokal, organisasi masyarakat, LSM, dan swasta dalam setiap pengambilan keputusan di daerah menjadi hal yang cukup menarik untuk di analisa.

¹⁵<http://dpmptptk.barrukab.go.id/2018/01/02/perusahaan-semen-china-di-barru-pt-conch-akui-tak-punya-izin-beraninya-mereka-buka-pabrik-semen/> diakses pada 20 Mei 2018

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menemukan permasalahan yang akan penulis bahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1** Bagaimana pola konflik yang terjadi dalam pembangunan pabrik semen PT Conch Cement di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan?
- 1.2.2** Bagaimana peran aktor sebagai bagian dari sub sistem kebijakan dalam pembangunan PT Conch Barru Cement yang telah berlangsung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1** Untuk mengetahui model dan pola konflik pada PT Conch Cement Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
- 1.3.2** Untuk mengetahui dan mengkaji konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat pada konflik pendirian PT Conch Cement di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pendidikan khususnya dibidang ilmu politik untuk menambah pemahaman, wawasan, dan ilmu pengetahuan terkait dinamika relasi pemerintahdaerah dan perusahaan

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai hubungan dinamika relasi pemerintah dan perusahaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Bagi Penulis

Penulisan ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis mengenai permasalahan yang diteliti, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dalam ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Airlangga.

1.5.2 Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan informasi serta menambah wawasan serta referensi dalam penelitian hukum lebih lanjut

1.5.3 Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan masyarakat memahami lebih tentang dinamika relasi antara pemerintah dengan perusahaan.

1.6 Teori Konflik

Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa latin yakni *configere* yang artinya saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu.¹⁶ Konflik juga didefinisikan sebagai interaksi sosial antar individu atau kelompok yang lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada persamaan.¹⁷ Konflik juga diartikan sebagai pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada. Selain itu konflik sendiri

¹⁶ Antonius Atosokhi Gea, dkk, Relasi Dengan Sesama, (Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002), hlm 175

¹⁷ Bunyamin Maftuh, Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai, Program Pendidikan Kewarganegaraan, (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2005), hlm 47

dibedakan dengan sengketa. Hanya saja dalam penggunaan secara umum di Indonesia, istilah konflik selalu ditukargunakan dengan sengketa.¹⁸

Dalam hal ini teori konflik memandang masyarakat terus menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat berpotensi dan dapat menciptakan perubahan sosial. Pada konteks pemeliharaan tatanan sosial akan lebih menekankan kepada peranan kekuasaan. Konflik diyakini sebagai fakta utama dalam masyarakat. Secara empiris konflik, tidak diakui karena orang lebih memilih stabilitas sebagai hakikat masyarakat. Namun konflik merupakan realitas yang harus dihadapi.

Ide dasar dari adanya konflik adalah dari pemikiran dua tokoh yaitu Karl Marx dan Max Weber dalam studi keilmuan pemikiran ini terus dikembangkan. Dasar pemikiran Marx mengenai konflik adalah adanya perbedaan kelas dalam konflik, salah satunya diakibatkan oleh proyek industrialisasi yang hanya mengejar keuntungan ekonomi. Adanya perjuangan masyarakat dalam konflik juga menjadi konsep fundamental yang diakui oleh Marx sebagai jalan keluar yang berkaitan erat dengan revolusi. Pada hakikatnya Marx melihat konflik sebagai perbedaan pendapat dalam sistem sosial, maka masyarakat dalam hal ini berada dikondisi tidak baik-baik saja.

Sedangkan pandangan Weber dalam hal ini juga melihat bahwa ciri dasar kehidupan sosial sebenarnya adalah konflik perebutan sumber daya ekonomi. Sehingga fokus dalam pemikiran ini menyoroti adanya konflik akan mempengaruhi perubahan sosial. Pertama, konflik di arena politik yang melihat perubahan sosial terjadi karena adanya kekuasaan dan dominasi individu atau kelompok tertentu. Sehingga batas dari pandangan ini bertumpu pada keuntungan finansial. Kedua, sifat konflik berkaitan dengan ide dan cita-cita, baik itu doktrin agama, filsafat sosial, atau gagasan gaya hidup. Cita-cita ini tidak merujuk dengan pertentangan saja melainkan juga digunakan sebagai senjata atau alat untuk berkonflik, seperti konflik politik. Dalam hal ini pemikiran Weber mengenai konflik cenderung berkonotasi materialistis dan idealis dalam mengungkapkan pendekatan sosiologis yang komprehensif.

¹⁸ Putut Handoko, Tesis: "Mediasi Konflik Penanganan Kerusakan Pantai, Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hlm 32

Teori konflik selanjutnya adalah pemikiran Dahrendorf yang dipopulerkan dalam karyanya “Konflik Kelas dan Kelas dalam Masyarakat Industri” pada tahun 1959. Teori ini direkomendasikan untuk memodifikasi teori sebelumnya karena telah adanya adaptasi dalam analisis masyarakat modern. Teori ini menawarkan konsep dan teori yang lebih memperhatikan penjelasan mengenai masyarakat kapitalis dan pasca-kapitalis. (Dahrendorf, 1959 : 28)

Giddens melihat modernisasi dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu sebagai mesin perusak dari nilai dan tradisi lokal, namun juga bisa menjadi sebuah peluang untuk menuju tatanan masyarakat yang madani. Giddens melukiskan kontradiksi antara globalisasi dalam dua perspektif tersebut pada teorinya mengenai tipologi masyarakat tradisional dan post-tradisional.

Dalam masyarakat yang bertipe tradisional, aktivitas individu tidak ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan yang berlebihan, karena pilihan yang tersedia telah mengacu pada pradeterminasi, berupa kebiasaan, tradisi, atau nilai. Di sisi lain, masyarakat post-tradisional lebih cenderung tidak memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang “pakem” dilakukan di masa sebelumnya. Justru masyarakat post-tradisional lebih memperhatikan pertimbangan logis-rasional untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Masyarakat post-tradisional inilah yang disebut sebagai masyarakat modern. Dalam satu perspektif, masyarakat modern lebih berpikiran rasional; ia dapat memperhitungkan apa yang akan terjadi ke depan dengan pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan pribadi, sehingga struktur yang berlaku bisa saja berubah setiap saat. Namun, dalam perspektif lain, modernitas ini justru berkorelasi negatif dengan sustainability dan lingkungan, karena pikiran rasional cenderung berorientasi pada modal dan keuntungan, dengan melepaskan alam sebagai basis kerja, hal ini merupakan bentuk kritik dari Giddens.

Kapitalisme dapat memberikan andil terbesar dalam kekeruhan dunia modern saat ini. Kapitalisme mendorong manusia untuk terus berkompetisi, sementara industrialisme merangsang manusia untuk berinovasi. Kompetisi mendorong untuk inovasi teknologi mengalami percepatan perkembangan akibat dukungan modal dari

korporat-korporat raksasa. Para kapitalis tidak henti-hentinya menemukan produk-produk baru, demikian pula pada teknologi. Dalam hal ini batas-batas teritorial negara (*nation-state*) tidak dihiraukan, demikian pula batas-batas kultur. Bahkan manusia sebagai individu juga tidak diperhitungkan, yang penting adalah maju dan baru.

Dari kembangan teori sebelumnya, Dahrendorf memberikan pandangan mengenai konflik lebih tajam. Dahrendorf memandang otoritas dari sebuah konflik bukan terletak pada individu melainkan wewenang atau posisi. Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih luas, hal ini berkaitan dengan sumber struktur konflik dapat dicari dengan menganalisis konflik dan mengidentifikasi berbagai peran kepentingan dalam masyarakat. Dengan konsep sentral pada wewenang dan posisi, keduanya merupakan fakta sosial yang mendapat perhatian utama sosiolog dalam menjawab struktur sebenarnya dari konflik-konflik yang ada, sehingga dalam menyusun peranan sosial dapat dibantu dengan kemungkinan informasi mengenai dominasi yang terjadi karena dalam menganalisa konflik adalah melihat pada berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat (Dahrendorf 1959 : 165).

Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok, yaitu kelompok semu (*quasi group*), kelompok kepentingan (*interest group*), dan kelompok konflik. Kelompok semu (*quasi group*) adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Kelompok kepentingan adalah kelompok yang terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas, dalam kelompok ini telah memiliki struktur, organisasi, program, tujuan, serta anggota yang jelas dan juga dapat diartikan bahwa kelompok kedua inilah yang nantinya menjadi sumber nyata dari konflik dalam masyarakat (Ritzer 1992). Dan kelompok konflik adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkomendasikan oleh kelompok semu yang lebih besar

¹⁹ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri : Sebuah analisa kritik*, (Jakarta : CV Rajawali, 1986), hlm 165

dalam struktur kepentingan. Sehingga tiga konsep utama yang dianalisis dalam teori Dahrendorf ini adalah mengenai kekuasaan,kepentingan,dan konflik sosial.

Dalam memetakan kepentingan, menurut Dahrendorf dapat dilakukan dengan meninjau 2 hal yaitu secara manifest (disadari) atau dengan tingkah laku potensial yang telah dilakukan seseorang dalam menduduki peranan tertentu. Otoritasdarikepentingan ini merujuk pada penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dapat dikatakan sebagai atasan dan bawahan (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004 : 153). Adanya konflik yang terus berkembang dapat dilihat dengan otoritas wewenang dan kekuasaan yang berjalan tidak seimbang yang kemudian menimbulkan dua golongan yang bertentangan , yaitu golongan yang berkuasa dalam mempertahankan status quo dan golongan yang dikuasai adalah mereka yang ingin selalu mengalami perubahan.

Dahrendorf menyatakan bahwa masyarakat adalah pihak yang selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan, yang ditandai dengan pertentangan terus menerus di antara unsur-unsur. Teori konflik memandang adanya kepaksaan dan kekangan yang diperoleh masyarakat dari pihak lain yang ingin memenuhi kebutuhannya, sehingga pada beberapa posisi dalam masyarakat adalah bentuk kekuasaan yang didelegasikan cenderung berasal dari otoritas kelembagaan. Alit(2005: 18) lebih jelas mengemukakan bahwa adanya kekuasaan akan membentuk hubungan yang simetris dalam arti bahwa terdapat salah satu pihak yang memerintah,satu pihak yang diperintah, dan satu pihak yang mematuhi perintah.

Bagi Dahrendorf konflik dapat timbul melalui relasi-relas sosial dalam sistem, setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat konflik,dalam hal ini dapat dipahami bahwa relasi-relasi yang ada dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Kekuasaan didefinisikan “kemungkinan bahwa satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi melakukan perlawanan tanpa melihat dari kemungkinan perlawanan itu

²⁰ George Ritzer, Douglas J Goodman. 2003 . Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam, (Jakarta : Kencana), hlm 156

menyerah”. (Dahendorf,1959: 166). Kekuasaan dalam masyarakat modern dan industrial dapat diterjemahkan sebagai wewenang (authority). Dahrendolf melihat wewenang adalah: (1) relasi wewenang yaitu selalu relasi-relasi antara super dan subordinasi; (2) dimana ada relasi-relasi wewenang, kelompok-kelompok subordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan; (3) berbagai harapan tertanam relatif permanen dalam posisi sosial dari pada karakter individual; (4) dengan keberadaan fakta ini (kekuasaan superordinasi, penulis), mereka selalu melibatkan spesifikasi subjek-subjek perorangan untuk mengontrol dan spesifikasi dari ruang sosial yang kontrol mungkin dilakukan; dan (5) wewenang menjadi hubungan terlegitimasi, tanpa protes dengan perintah-perintah otoritas dapat diberi sanksi; sesungguhnya hal ini merupakan fungsi sebenarnya dari sistem legal untuk mendukung pemberlakuan wewenang yang memiliki legitimasi. (Dahrendorf, 1959: 166-167)

Dari adanya konsep teori Dahrendorf diatas, selanjutnya dapat dilakukan pemetaan dan tahapan konflik dari berbagai aspirasi pihak-pihak dengan saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing yang terlibat. Pemetaan merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menggambarkan konflik serta menghubungkan peran satu pihak dengan pihak lainnya. Ketika dalam hal ini masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda maka pemetaan dapat dilakukan secara bersama.

Metode gambaran singkat mengenai sikap masing-masing pihak terhadap situasi konflik, dapat dengan membuat skema yang bersifat indikatif daripada bersifat menyeluruh. Wehr dan Bartos dalam Susan (2009) mengemukakan teknik pemetaan konflik, sebagai berikut:

1. *Specify the context*, yang menelusuri informasi mengenai sejarah konflik dan bentuk fisik serta tata organisasi yang berkonflik. Konflik tidak muncul di ruang hampa, bisa muncul dalam konteks politik negara, keluarga, perusahaan, dan komunitas etnis dan agama.

2. *Identify the parties*, menemukan siapakah yang menjadi pihak-pihak berkonflik. Pihak utama berkonflik adalah mereka yang menggunakan perilaku dan tindakan koersif yang memiliki arah kepentingan dari hasil konflik. Pihak konflik sekunder yaitu pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil konflik. Pihak ketiga adalah aktor netral dan bersedia mendorong proses resolusi konflik.
3. *Separate goals from consequences*, seorang peneliti perlu memisahkan konflik apa yang menjadi akar konflik serta akibat-akibat sampingan dari konflik, seperti konflik rumah tangga.
4. *Separate goals from interest goals*, yaitu mengkaji sasaran selama proses konflik berlangsung, dalam hal ini analisis harus tajam dan spesifik.
5. *Understand the dynamics*, dinamika merupakan perkembangan situasi-situasi yang dibentuk maupun dihasilkan dari berbagai konflik yang terjadi pada pihak yang berkaitan
6. *Search for positive functions*, yaitu dengan menemukan bentuk-bentuk perilaku yang memungkinkan konflik untuk dapat diselesaikan
7. *Understand the regulation potential*, yaitu bagaimana aturan legal, seperti undang-undang atau hal apapun yang dapat mengintervensi atau menggawangi proses konflik

1.6.1 Dinamika Konflik

Teori-teori sosiologi konflik memberi pengaruh besar terhadap berbagai pendekatan analisis konflik multidisipliner. Sosiologi konflik struktural, seperti pemikiran Dahrendorf mempengaruhi pendekatan kajian konflik, terutama yang disebut sebagai pendekatan primordial dan instrumental. Langkah penting dalam analisis konflik pragmatis adalah pemetaan konflik. Pemetaan konflik yaitu memberikan deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik yang terjadi. Dalam memahami dinamika konflik dapat dilakukan dengan 2 hal, yaitu; Pertama, dengan melihat pada sumber

konflik, yaitu segala sesuatu yang menjadi inti masalah seperti sumber daya alam, perbedaan tafsir agama, atau etnis. Kedua, dengan menganalisis karakter hubungan (*relationship*) di antara berbagai pihak berkonflik. Karakter hubungan konflik ini bisa memanfaatkan beberapa perspektif sosiologi konflik, baik positivis, kritis, dan humanis. Secara umum, ketiga mazhab sosiologi konflik mengacu pada hubungan kekuasaan guna melihat dinamika konflik.

Dinamika konflik merupakan segala macam interaksi yang berkembang dan pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih yang dapat memunculkan suatu konflik. Dinamika konflik merupakan perubahan dalam ruang isu yang diperebutkan dari waktu ke waktu sehubungan dengan perilaku aktor atau masalah yang lebih luas. Dari adanya berbagai macam dan perkembangan interaksi atau tindakan yang terjadi dapat memunculkan berbagai tahapan dinamika konflik. Fisher (2001) dalam (Susan, 2014: 88-89) membagi tahap dalam menganalisis suatu konflik dengan beberapa tahap, yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik:

1. Prakonflik

Periode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensiterjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/ atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.

2. Konfrontasi

Memperlihatkan suatu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Jikahanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin pada pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau melakukan aksi konfrontasi lainnya. Ladang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya di antara kedua pihak.

3. Krisis atau puncak konflik

Tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens atau massal. Komunikasi terputus dan muncul pernyataan yang cenderung menuduh pihak lain. Konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Akibat menunjukkan pada situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada tahap kritis. Bisa jadi salah satu pihak menang, atau kalah, atau bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama.

4. Pascakonflik

Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. Pada tahap ini ketegangan mulai berkurang namun masalah belum teratasi sepenuhnya.

1.6.2 Relasi Aktor Dalam Dinamika Konflik

Aktor merupakan individu atau kelompok yang mempunyai jaringan kekuasaan atas suatu kepentingan tertentu (Krott, 2005 : Sahide dkk, 2016). Dalam konflik pembangunan industri dapat dilakukan dengan pendekatan teori *stakeholder*, yang bertujuan untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam konflik beserta perannya masing-masing. Teori stakeholder menurut Freeman (1984) merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi juga dipengaruhi oleh kelompok atau individu lain untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Secara eksplisit teori ini memiliki pandangan yang bersifat kompleks dan dinamis, yang dapat dilihat dari hubungan sosial yang saling mempengaruhi dalam bentuk responsibilitas dan akuntabilitas oleh masing-masing kelompok atau individu.

Menurut Febryano dkk (2015) relasi kuasa antar aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan industri juga kerap terbentuk dari adanya perbedaan kepentingan juga tingkat kekuasaan yang berbeda. Hal ini merupakan salah satu sumber yang dapat memicu konflik antar pihak karena masing-masing aktor berusaha untuk memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk mempertahankan kepentingannya (Krott et al., 2014). Premis dari teori ini mengungkapkan apabila semakin kuat

hubungan antar individu kelompok yang terlibat dalam *stakeholder*, maka akan semakin baik akses untuk mencapai suatu tujuan. Sebaliknya, semakin buruk hubungan antar individu kelompok yang terlibat dalam *stakeholder*, maka akan semakin sulit dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hubungan yang kuat dalam hal ini dikategorikan berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, juga kerjasama. Dengan demikian, keberadaan suatu koorporasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*.

Meminjam pada teori *actor centered power* (Krott et al., 2014) dalam memahami dinamika antar aktor setidaknya ada tiga (3) elemen kekuasaan yang penting untuk diteliti, yaitu:

- a. Koersi; Mengubah perilaku subordinat melalui paksaan dan tekanan. Dalam hubungan sosial, hal ini dapat terjadi karena adanya kekuasaan dari satu pihak tertentu untuk dapat mengubah perilaku aktor lainnya. Seperti adanya ancaman, intervensi, ataupun bentuk tekanan lainnya
- b. *Incentives*; Mengubah perilaku subordinat dengan cara menimbulkan keuntungan maupun kerugian, dapat dilakukan dengan memberikan bantuan apapun dalam pengelolaan pembangunan hingga pencabutan sumber keuntungan materiil atau non materiil
- c. Informasi dominan ; Mengubah perilaku subordinat dengan informasi yang tidak terverifikasi. Jika subordinat tidak memverifikasi informasi yang diterima oleh ordinat, maka ordinat telah mengubah perilaku subordinat tanpa mengakui keberadaannya

1.7 Konseptualisasi

1.7.1 Investor

Seringkali investor sebagai pemilik modal dikaitkan dengan para elite-elite yang terhubung didalamnya. Dalam meluncurkan segala kegiatan yang ada pada perusahaan, pihaknya tentu membutuhkan dukungan yang dapat menjamin keberlangsungan berdirinya perusahaan. Kekuasaan dan kekayaan kapitalis berasal dari kemampuan mengontrol serta membatasi pihak-pihak lain untuk bisa ikut terlibat dalam mengakses sumber daya alam yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan cenderung berada pada kegiatan yang cenderung dekat dengan eksploitasi lingkungan. Pada realitas yang terjadi kegiatan suatu perusahaan di dominasi oleh proses operasi yang tidak memperdulikan antara keadilan sosial dan kapitalisme global. Bahkan keadaan seperti ini terus berkembang atas praktik pengelolaan manual menjadi modernitas dalam mengembangkan sektornya.

1.7.2 Industri

Proses industri seringkali juga dipahami sebagai konsep pembangunan. Apabila pembangunan itu dihubungkan dengan era globalisasi saat ini, sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain juga karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau

bahan dasar yang diolah. Pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Menurut Mubyarto (1988) sektor industri jika dikaitkan dengan pembangunan wilayah mempunyai tiga tujuan, yaitu:²¹

1. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya membangun daerah dengan meningkatkan produktivitas masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan pemerintah pusat dalam memberikandukungan kepada upaya-upaya pembangunan daerah dalam menaikkan pendapatan masyarakat.

Namun dalam realitanya hadirnya industri tidak hanya memberikan pengaruh positif saja melainkan juga terciptanya perubahan pada tatanan sosial masyarakat.²² Modernisasi tentu akan melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrilisasi, urbanisasi, diferenisasi, sekularisasi, sentralisasi, dan sebagainya.²³ Hal ini yang akan mengkaji antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri akan selalu berhubungan. Kajian ini menitikberatkan pada fokus manusia dengan mekanisme kerja industri yang berorientasi pada efisiensi dan efektifitas.

Secara internal ; Analisis tingkah laku manusia dalam hubungan kerja di perusahaan atau industri, diantaranya:

- a. Hubungan kerja dalam industri
- b. Organisasi industri
- c. Manajemen industri

²¹ Mubyanto, Santoso K. 1988. Pembangunan Pedesaan di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, hlm 83.

²² Syaifullah. 2009. Industrilisasi, Manusia Industri dan Perubahan Sosial. Jurnal Geografi GEA. 9. (1), hlm 39

²³ Adon Nasrullah Jamaluddin. 2016 . Sosiologi Pembangunan. Bandung : Pustaka Setia, hlm 227.

d. Leadership dalam industri

Secara eksternal; Analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial ekonomi dan kultural yang berbeda-beda.²⁴

- a. Tipologi masyarakat industri
- b. Perkembangan masyarakat industri
- c. Birokrasi (kaitan birokrasi dan industri)
- d. Analisis dampak lingkungan
- e. CSR (Coorporate Social Responsibility)

1.7.3 Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem sosial. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²⁵

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari MacIver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial

²⁴ Supardan, Dadang. 2008. Pengantar Ilmu Sosial; Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 83

²⁵ Prof. Dr. Koentjaraningrat. 2013. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta, hlm 48

lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.²⁶

Dari menurut beberapa ahli yang mendefinisikan tentang masyarakat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama, yang melakukan interaksi antara satu dengan yang lain untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial dalam lingkungan mereka. Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu:

1. Adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggotanya
2. Timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau *lesprit de corps*. Proses itu biasanya bekerja disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana trial and error. Agar tidak simpang siur dalam menggunakan istilah, kelompok/ group di sini adalah setiap himpunan manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya. Sebagai satu resiprositas. Kelompok tersebut belum terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah crowd, class, primary dan secondary group dan organisasi besar.²⁷

1.7.4 Stakeholders

Stakeholders adalah (1) pihak-pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh suatu isu atau pihak yang berkaitan dengan satu kegiatan yang dapat mempengaruhi isu; (2) Pihak-pihak yang memiliki informasi, sumberdaya, dan keahlian khusus yang dibutuhkan untuk strategi formulasi dan implementasi, dan (3) Pihak-pihak yang mengatur proses relevan implementasi

²⁶ Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm 137.

²⁷ Ibid, hlm 138

Berdasarkan karakteristiknya, *stakeholder* dibagi menjadi 2 (Clarkson, 1995) , yaitu *stakeholder* primer atau *stakeholder* langsung adalah pihak-pihak yang ada disebabkan atas kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab atau klaim atas sumberdaya, atau sebagai pihak sentral dalam inisiasi. Sehingga keluaran dari partisipasi atau aksi yang dilakukan oleh pihak ini akan mempengaruhi pihak-pihak tertentu secara langsung. Kelompok ini dapat meliputi komunitas lokal, swasta, pemerintah lokal dan nasional, dan lain sebagainya. Kategori ini memiliki kekuasaan, mengontrol kebijakan, hukum atau sumberdaya yang memiliki kapasitas yang dapat mempengaruhi keluaran. Sedangkan *stakeholder* sekunder, adalah pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam keluaran. Kelompok ini dapat meliputi konsumen, pemerintah, dan swasta. Keterlibatan dari kategori ini dibutuhkan secara periodik, namun tidak untuk ikut terlibat dalam keseluruhan proses perencanaan atau implementasi inisiasi.

Muchtar, dkk (2012) menyebutkan bahwa dalam melakukan analisis aktor kepentingan dapat dengan mempertimbangkan empat langkah, yaitu:

1. Mengidentifikasi adanya kepentingan
2. Menilai kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan dan potensi pengaruh mereka terhadap program
3. Menilai pengaruh dan pentingnya para pemangku kepentingan
4. Membuat kerangka strategi pelibatan tiap pemangku kepentingan dengan mengacu pada:
 - a. Kepentingan-kepentingan pentingnya dan pengaruh dari tiap kelompok pemangku kepentingan
 - b. Usaha-usaha khusus yang diperlukan untuk melibatkan para pemangku kepentingan yang penting namun lemah pengaruhnya
 - c. Bentuk pelibatan yang tepat

Stakeholder yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi adalah individu atau kelompok yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung

terhadap sumberdaya, dalam hal ini keterlibatannya penting untuk ikut dalam setiap proses pengambilan keputusan atas suatu isu. Sedangkan *stakeholder* yang mempunyai pengaruh atau kepentingan yang rendah hanya perlu mengawasi, jika diperlukan dalam memberikan informasi, juga sebagai penyeimbang dalam suatu isu.

1.8 Kerangka Teori

1.8.1 Konflik Perizinan

Adanya konflik lingkungan hidup dapat dilihat dari adanya perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah terjadi. Dari awal proyek pembangunan ini telah dikecam oleh sebagian masyarakat yang merasa bahwa adanya rencana proyek industri ini pada awalnya tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Adanya sikap protes yang dilakukan masyarakat terjadi ketika mereka mengetahui telah adanya izin prinsip dan lingkungan yang telah dimiliki PT Conch Barru Cement. Hal ini menjadikan asumsi negatif oleh masyarakat atas pembangunan yang sedang berlangsung, sebab ada beberapa hal terkait perubahan lingkungan dan tatanan sosial yang menjadi kekhawatiran masyarakat dari adanya pembangunan industri tersebut.

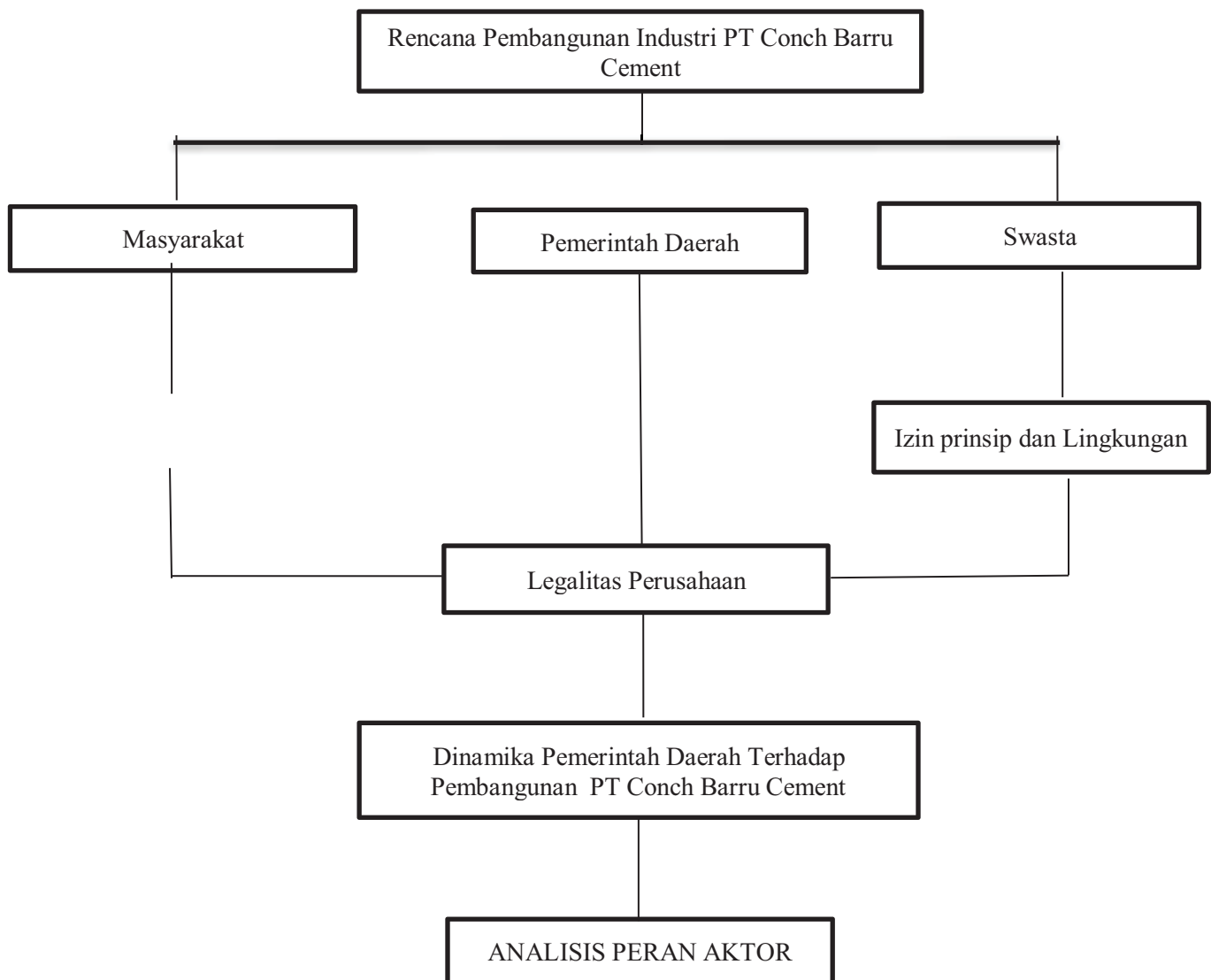
Dasar izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Barru yang menjabat pada saat itu telah diartikan oleh perusahaan dalam melanjutkan kegiatan pembangunan. Pasalnya putusan yang dikeluarkan oleh Bupati harusnya digunakan untuk melanjutkan progres perizinan-perizinan selanjutnya, namun hal ini ditindaki oleh perusahaan dengan melanjutkan pembangunan pada beberapa titik lokasi yang telah ditentukan sebagai pabrik maupun kantor utamanya. Permasalahan ini terus berkembang hingga menjadi konflik, sebab point utama dari awal konflik terjadi adalah status perusahaan yang valid. Artinya perusahaan tidak bisa melakukan kegiatan apapun sebelum izin-izin yang seharusnya terpenuhi. Jadi dalam hal ini legalitas dari pembangunan PT Conch Barru Cement masih dipertanyakan dan belum memiliki kepastian hukum.

1.8.2 Pendekatan aktor dan kepentingan

Izin prinsip dan lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Barru menunjukkan adanya dominasi dalam praktik pembangunan industri ini. Sebab dari awal adanya kegiatan ini telah melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan termasuk pihak yang terlibat dalam urusan Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya konfrontasi, dapat dilihat sebagai rentetan konflik menjadi pertanyaan mendasar mengenai upaya apa yang telah dilakukan oleh para stakeholder terhadap dinamika konflik yang terjadi. Pertanyaan ini seolah memberi anggapan terhadap upaya penyelesaian konflik yang tidak efektif atau setengah-setengah tanpa memberikan solusi secara tuntas.

Dari perbedaan kepentingan antara dua pihak ini yang kemudian dapat dialami adanya keterlibatan beberapa aktor dalam proyek pembangunan. Adanya hubungan yang terbentuk dalam organisasi pemerintah daerah akan dipahami sebagai bagaimana proses pengambilan keputusan dapat memiliki kekuatan untuk menggambarkan pengaruh pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada bagaimana seorang pemangku kepentingan dapat bertanggung jawab dalam memegang organisasi

1.1 BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN



sumber: Data Skunder Diolah Oleh Peneliti, 2019

1.9 Metode dan Prosedur Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan fenomena yang telah terjadi. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan. Dengan metode kualitatif, peneliti akan melihat konflik kepentingan yang ada pada kasus pendirian perusahaan yang belum berizin dalam kegiatan penambangan semen di Kabupaten Barru.

Dalam penelitian kali ini, peneliti juga menggunakan metode *in depth interview*, yaitu peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi konflik terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh PT Conch Barru Cement. Dengan memenuhi pedoman wawancara yang ada, seperti mencatat secara sistematis mengenai jawaban yang diberikan oleh narasumber, juga mendokumentasikan segala kegiatan wawancara yang nantinya akan menjadi acuan bagi peneliti untuk mendukung hasil perolehan informasi yang didapatkan.

1.9.2 Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini berguna untuk membatasi permasalahan yang nantinya akan diteliti agar peneliti terfokus pada lingkup studi yang telah ditentukan. Peneliti memfokuskan pada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam penertiban pendirian izin bangunan di Kabupaten Barru diantaranya, Pemerintah Kabupaten Barru, perusahaan, pihak keamanan, serta masyarakat dengan melihat kepentingan serta relasi oleh masing-masing pihak dalam konflik.

Penelitian ini memiliki batasan dalam menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis. Batasan-batasan tersebut dikarenakan penulis hanya memfokuskan pada dinamika konflik yang terjadi pada PT Conch dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru selama kurun waktu 2015 hingga 2018 yaitu kondisi dimana perusahaan telah resmi ditutup.

1.9.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di beberapa tempat, yaitu Kelurahan Seppe'e dan Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut karena menarik untuk diteliti atas kasus yang sedang dialami PT Conch sebagai salah satu perusahaan semennasional yang ada di Kabupaten Barru.

1.9.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono, bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data adalah subyek dari data itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Sumber data primer atau sumber data utama, yaitu informasi yang berbentuk lisan yang diperoleh dari informan (manusia). Dan data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui media, dan keterangan lain yang berhubungan dengan PT Conch Cement.²⁸

1.9.5 Subyek Penelitian

Dalam metode kualitatif yang menjadi subyek penelitian atau informan adalah narasumber yang akan membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian atau pihak yang terlibat secara langsung atas fenomena sosial yang sedang berlangsung. Adapun pihak yang dikemukakan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses konflik, yaitu pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat. Untuk mendapatkan data yang signifikan, peneliti akan menentukan subyek penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Subyek Penelitian

Instansi	Peran	Nama/Jabatan
Perwakilan Bupati Barru	Bertanggung jawab atas pembangunan PT Conch Barru sekaligus representasi visi dan misi pembangunan Kepala Daerah	‘Z’
Perwakilan DPRD	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Barru	‘H’ (anggota DPRD Kabupaten Barru)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Sate Pulu (DPMPTSP)	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan asas-asas pelayanan publik	Syamsir S.IP, M.Si (Kepala DPMPTSP)
Perwakilan PT Conch Barru Cement	Investor yang akan melakukan pembangunan industri di Kabupaten Barru	‘S’
Tokoh Masyarakat	Menjadi salah satu sumber ide dan kekuatan dalam pengambilan keputusan masyarakat desa	Syamsuddin Coli
Dinas Pengelolaan Lingkungan hidup (DPLH)	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup di Kabupaten Barru	Drs.Muh Taufik Mustafa, M.Si, /Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Fasilitator yang menjembatani aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru	Abdu Samid / Ketua LSM Harimau Bersayap

²⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: PT Alfabet, 2016), hlm 225

Masyarakat Kontra	Warga masyarakat yang menentang berdirinya PT Conch Cement di Barru	Junaedi
Masyarakat Pro	Warga masyarakat yang mendukung berdirinya PT Conch Cement di Barru	Juhaepa

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan studi pustaka dan metode penelitian lapangan. Metode studi pustaka digunakan sebagai data sekunder yang didapatkan dari media online/internet juga dokumen yang relevan dengan konflik yang terjadi. Sedangkan metode penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yaitu dengan observasi keadaan di lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan bertatap muka langsung maupun dengan komunikasi melalui media. Teknik wawancara dilakukan dengan cara tidak teratur. Artinya informasi yang diambil dapat menjadi gambaran awal sebelum menemukan kunci dan juga gambaran secara utuh dari informan dari konflik yang terjadi. Dari cara ini peneliti memperoleh jawaban yang lebih variatif.

Dan untuk validasi data dari informan sebelumnya dapat dilakukan kepada informan yang merekomendasikan kepada peneliti (*snow ball*). Dengan melalui informan yang berbeda dan memberikan pertanyaan yang sama adalah cara peneliti memvalidasi temuan di lapangan.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari literatur yang terkait dengan kasus yang terjadi pada PT Conch, yaitu melalui berita online di internet. Selain itu, peneliti juga mempelajari dokumen yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan PT Conch.

2. Observasi Lapangan

Kegiatan ini digunakan dengan mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan dengan melakukan pencatatan berdasarkan pengamatan. Penelitian akan mengamati segala kejadian yang relevan dengan kegiatan yang terkait PT Conch, baik interaksi dari pemerintah maupun masyarakat.

3. Kegiatan berdasarkan pada pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti sebagai acuan dan batas dalam pertanyaan penelitian. Wawancara digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana yang ada dalam rumusan masalah.

1.9.5 Teknik Analisa Data

Tahap analisis data ini bertujuan untuk memenuhi kegiatan penelitian yaitu memperoleh informasi yang valid mengenai gambaran yang terjadi di lapangan yang kemudian akan menjadi landasan peneliti dalam tinjauan pustaka sebagai informasi pendukung. Analisis data merupakan penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam tahap ini terlebih dahulu adalah dengan menuliskan kembali seluruh percakapan dalam wawancara/transkrip, kemudian menyusun hasil transkrip yang ada untuk dikaji dalam menjawab studi literatur yang telah ditentukan. Selanjutnya, analisa data dengan menginterpretasikan teori yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban rumusan masalah penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal hingga sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif tidak ada buku panduan untuk melakukan analisis data, tetapi secara umum dalam pelaksanaan tahap ini terdapat komponen-komponen wajib yang harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.